



BASARNAS

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Jl. Angkasa Blok B, 15
Kav. 2 - 3 Jakarta 10720
<http://www.basarnas.go.id>
E-mail : basarnas@basarnas.go.id

Telp. : (021) 65701116 / 65867510
Fax : (021) 65701152
Emergency : 115 - (021) 65867511
Emergency Fax : (021) 65867512

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
2. Para Pejabat Pimpinan Pratama di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGELOLAAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERKAIT DENGAN PENULISAN NAMA
JABATAN, PENOMORAN, DAN PENUGASAN PEJABAT FUNGSIONAL SEBAGAI
KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR**

1. Latar Belakang

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pencarian dan pertolongan. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan dukungan penyelenggaraan administrasi yang andal, efektif, dan efisien karena semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, akan berdampak pada makin banyaknya jumlah arsip/naskah dinas yang tercipta.

Setiap arsip yang tercipta haruslah autentik, utuh, dan terpercaya karena arsip merupakan alat bukti yang sah dan bukti akuntabilitas kinerja untuk menciptakan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government*. Terkait dengan hal tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang digunakan sebagai acuan pengelolaan naskah dinas meliputi pengaturan tentang jenis

dan...

dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, lambang instansi dan cap dinas, penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, perubahan, pencabutan, pembatalan produk hukum serta ralat.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terdapat penyederhanaan birokrasi yang membuat beberapa perubahan terhadap nomenklatur jabatan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dengan adanya perubahan tersebut perlu ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama tentang pengelolaan naskah dinas di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait dengan penulisan nama jabatan, penomoran, dan penugasan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan kepada para pejabat dan petugas yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan naskah dinas di lingkungan unit kerjanya.

Surat Edaran ini bertujuan agar pengelolaan naskah dinas sesuai dengan penulisan nama jabatan, penomoran, dan penugasan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator serta sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat tercipta arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat penulisan nama jabatan pada bagian kaki, penggunaan singkatan dan akronim pada penomoran nota dinas, dan daftar nama penugasan Pejabat Fungsional sebagai Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta singkatan dan akronim unit kerja.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

c. Peraturan ...

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- d. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- e. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);

5. Isi Edaran

- a. Penulisan nama jabatan pada bagian kaki (penandatanganan) naskah dinas.

- 1) Bagian kaki naskah dinas terdiri dari nama jabatan (ditulis dengan huruf awal kapital), tanda tangan, dan nama pejabat (ditulis dengan huruf awal kapital);
- 2) Untuk Surat Undangan/ Surat Dinas, kewenangan penandatanganan paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Administrator;
- 3) Untuk korespondensi internal unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menggunakan format Nota Dinas dan kewenangan penandatanganan dapat ditandatangani sampai dengan jabatan setingkat Subkoordinator. Berikut contoh penandatanganan oleh Koordinator/Subkoordinator :

- Arsiparis Ahli Madya
Koord. Substansi Administrasi,

Nama
Pangkat/Gol
- Arsiparis Ahli Muda
Subkoord. Persuratan dan Kearsipan,

Nama
Pangkat/Gol

b. Penggunaan...

b. Penggunaan Singkatan dan Akronim pada penomoran Nota Dinas

- 1). Jika kewenangan penandatanganan berada pada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas, maka singkatan dan akronim yang digunakan pada penomoran nota dinas adalah singkatan dari nama pejabat yang menandatangani nota dinas tersebut.

Contoh :

ND/ /KARO UMUM/ADM.01.02/XII/BSN-2020

ND/ /KABAG RUMTA & PROTOKOL/PL.02/XII/BSN-2020

- 2). Jika kewenangan penandatanganan berada pada Koordinator/ Subkoordinator, maka akronim yang digunakan pada penomoran nota dinas adalah singkatan dari unit kerja tersebut.

Contoh :

ND/ /BIRO UMUM/ADM.01.02/XII/BSN-2020

ND/ /DIT SARPRAS/SP.01.01/XII/BSN-2020

- c. Daftar Nama Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta singkatan dan akronim unit kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Penutup

Dengan ditetapkan Surat Edaran ini di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat tercipta pengelolaan naskah dinas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Januari 2021

SEKRETARIS UTAMA,



DIANTA BANGUN

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

Lampiran

Surat Edaran Sekretaris Utama

Nomor : 1 Tahun 2021

Tanggal : 21 Januari 2021

A. Daftar Nama Penugasan Pejabat Fungsional Sebagai Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

NO	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PENUGASAN
1	2	3	4
I	Sekretariat Utama		
1.	Kepala Bagian Rencana dan Program pada Biro Perencanaan	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan	Koordinator Substansi Rencana dan Program pada Biro Perencanaan
2.	Kepala Bagian Evaluasi Dan Pelaporan pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perencanaan	Koordinator Substansi Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Perencanaan
3.	Kepala Bagian Kerja Sama pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perencanaan	Koordinator Substansi Kerja Sama pada Biro Perencanaan
4.	Kepala Bagian Hukum pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Koordinator Substansi Hukum pada Biro Hukum dan Kepegawaian
5.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Koordinator Substansi Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Hukum dan Kepegawaian

6. Kepala . . .

6.	Kepala Bagian Kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Koordinator Substansi Kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian
7.	Kepala Bagian Keuangan pada Biro Umum	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Umum	Koordinator Substansi Keuangan pada Biro Umum
8.	Kepala Bagian Administrasi pada Biro Umum	Arsiparis Ahli Madya pada Biro Umum	Koordinator Substansi Administrasi pada Biro Umum
9.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Biro Umum	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya pada Biro Umum	Koordinator Substansi Hubungan Masyarakat pada Biro Umum
10.	Kepala Bidang Pelayanan Informasi pada Pusat Data dan Informasi	Statistisi Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi	Koordinator Substansi Pelayanan Informasi pada Pusat Data dan Informasi
11.	Kepala Bidang Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi	Pranata Komputer Ahli Madya pada Pusat Data dan Informasi	Koordinator Substansi Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi
12.	Kepala Subbagian Rencana pada Biro Perencanaan	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Rencana pada Biro Perencanaan
13.	Kepala Subbagian Program pada Biro Perencanaan	Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Program pada Biro Perencanaan

14. Kepala . . .

14.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Wilayah Barat pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Wilayah Barat pada Biro Perencanaan
15.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Wilayah Timur pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Evaluasi dan Pelaporan Wilayah Timur pada Biro Perencanaan
16.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Kerja Sama Luar Negeri pada Biro Perencanaan
17.	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri pada Biro Perencanaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Perencanaan	Subkoordinator Kerja Sama Dalam Negeri pada Biro Perencanaan
18.	Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kepegawaian
19.	Kepala Subbagian Advokasi pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Advokasi pada Biro Hukum dan Kepegawaian

20. Kepala . . .

20.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Arsiparis Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Biro Hukum dan Kepegawaian
21.	Kepala Subbagian Tata Laksana pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Tata Laksana pada Biro Hukum dan Kepegawaian
22.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Biro Hukum dan Kepegawaian
23.	Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Pegawai pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Mutasi dan Disiplin Pegawai pada Biro Hukum dan Kepegawaian
24.	Kepala Subbagian Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kepegawaian	Subkoordinator Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian pada Biro Hukum dan Kepegawaian
25.	Kepala Subbagian Anggaran pada Biro Umum	Analisis Anggaran Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Anggaran pada Biro Umum

26. Kepala . . .

26.	Kepala Subbagian Perbendaharaan pada Biro Umum	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN) Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Perbendaharaan pada Biro Umum
27.	Kepala Subbagian Akuntansi pada Biro Umum	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Analisis Pengelolaan Keuangan APBN) Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Akuntansi pada Biro Umum
28.	Kepala Subbagian Barang Milik Negara pada Biro Umum	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Barang Milik Negara pada Biro Umum
29.	Kepala Subbagian Urusan Dalam pada Biro Umum	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Urusan Dalam pada Biro Umum
30.	Kepala Subbagian Pemeliharaan pada Biro Umum	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Pemeliharaan pada Biro Umum
31.	Kepala Subbagian Persuratan dan Kearsipan pada Biro Umum	Arsiparis Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Persuratan dan Kearsipan pada Biro Umum
32.			Subkoordinator Hubungan Antar

	Kepala Subbagian Hubungan Antar Media pada Biro Umum	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Umum	Media pada Biro Umum
33.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Publikasi pada Biro Umum	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Umum	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Biro Umum
34.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi pada Pusat Data dan Informasi	Statistisi Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi	Subkoordinator Penyajian Informasi pada Pusat Data dan Informasi
35.	Kepala Subbidang Pengolahan Data pada Pusat Data dan Informasi	Statistisi Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi	Subkoordinator Pengolahan Data pada Pusat Data dan Informasi
36.	Kepala Subbidang Infrastruktur Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi	Subkoordinator Infrastruktur Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi
37.	Kepala Subbidang Aplikasi Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi	Pranata Komputer Ahli Muda pada Pusat Data dan Informasi	Subkoordinator Aplikasi Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi
II.	Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan		
38.	Kepala Subdirektorat Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Operasi	Koordinator Substansi Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi
39.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi pada	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada	Koordinator Substansi Perencanaan dan Standardisasi Operasi

	Direktorat Kesiapsiagaan	Direktorat Kesiapsiagaan	pada Direktorat Kesiapsiagaan
40.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Rencana dan Per. 40. Kepala . . . Direktorat Operasi
41.	Kepala Seksi Standardisasi pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Standardisasi pada Direktorat Operasi
42.	Kepala Seksi Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Kapal dan Pesawat Udara pada Direktorat Operasi
43.	Kepala Seksi Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia pada Direktorat Operasi
44.	Kepala Seksi Penatausahaan Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Penatausahaan Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi
45.			

	Kepala Seksi Pelaksanaan Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Operasi	Subkoordinator Pelaksanaan Dukungan Operasi pada Direktorat Operasi
46.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Kesiapsiagaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Kesiapsiagaan	Subkoordinator Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Kesiapsiagaan
47.	Kepala Seksi Standardisasi pada Direktorat Kesiapsiagaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Kesiapsiagaan	Subkoordinator Standardisasi pada Direktorat Kesiapsiagaan
48.	Kepala Seksi Siaga pada Direktorat Kesiapsiagaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Kesiapsiagaan	Subkoordinator Siaga pada Direktorat Kesiapsiagaan
49.	Kepala Seksi Latihan pada Direktorat Kesiapsiagaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Kesiapsiagaan	Subkoordinator Latihan pada Direktorat Kesiapsiagaan
50.	Kepala Seksi Pengelolaan Fasilitas Siaga dan Latihan pada Direktorat Kesiapsiagaan	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Kesiapsiagaan	Subkoordinator Pengelolaan Fasilitas Siaga dan Latihan pada Direktorat Kesiapsiagaan
III.	Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan		
51.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada	Koordinator Substansi Perencanaan dan

	Standardisasi Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga	Direktorat Bina Tenaga	Standardisasi Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga
52.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga	Analisis Kepegawaian Ahli Madya pada Direktorat Bina Tenaga	Koordinator Substansi Pengelolaan Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga
53.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi Potensi pada Direktorat Bina Potensi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Bina Potensi	Koordinator Substansi Perencanaan dan Standardisasi Potensi pada Direktorat Bina Potensi
54.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Potensi pada Direktorat Bina Potensi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Bina Potensi	Koordinator Substansi Pengelolaan Potensi pada Direktorat Bina Potensi
55.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Bina Tenaga	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Tenaga	Subkoordinator Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Bina Tenaga
56.	Kepala Seksi Standardisasi Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Tenaga	Subkoordinator Standardisasi Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga
57.	Kepala Seksi Penyiapan Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga	Assessor SDM Ahli Muda pada Direktorat Bina Tenaga	Subkoordinator Penyiapan Tenaga pada Direktorat Bina Tenaga
58.	Kepala Seksi Sertifikasi pada Direktorat Bina Tenaga	Assessor SDM Ahli Muda pada Direktorat Bina Tenaga	Subkoordinator Sertifikasi pada Direktorat Bina Tenaga

59.	Kepala Seksi Pengelolaan Jabatan Fungsional pada Direktorat Bina Tenaga	Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Direktorat Bina Tenaga	Subkoordinator Pengelolaan Jabatan Fungsional pada Direktorat Bina Tenaga
60.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Bina Potensi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Potensi	Subkoordinator Rencana dan 57. Kepala . . . a Direktorat Bina Potensi
61.	Kepala Seksi Penyiapan Potensi pada Direktorat Bina Potensi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Potensi	Subkoordinator Penyiapan Potensi pada Direktorat Bina Potensi
62.	Kepala Seksi Pemasyarakatan pada Direktorat Bina Potensi	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Direktorat Bina Potensi	Subkoordinator Substansi Pemasyarakatan pada Direktorat Bina Potensi
IV.	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan		
63.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Koordinator Substansi Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana pada Direktorat Sarana dan Prasarana
64.			

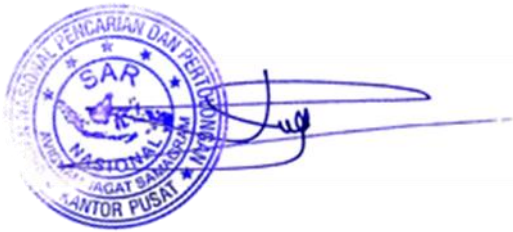
	Kepala Subdirektorat Dukungan pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Koordinator Substansi Dukungan Sarana dan Prasarana pada Direktorat Sarana dan Prasarana
65.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Standardisasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sistem Komunikasi	Koordinator Substansi Perencanaan dan St 65. Kepala . . . Direktorat Sistem Komunikasi
66.	Kepala Subdirektorat Penyiapan Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sistem Komunikasi	Koordinator Substansi Dukungan Komunikasi dan Sertifikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi
67.	Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Pemeliharaan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sistem Komunikasi	Koordinator Substansi Inventarisasi dan Pemeliharaan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi
68.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Subkoordinator Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Sarana dan Prasarana
69.			

	Kepala Seksi Standardisasi pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Subkoordinator Standardisasi pada Direktorat Sarana dan Prasarana
70.	Kepala Seksi Dukungan Sarana dan Prasarana pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Subkoordinator Dukungan Sarana dan Prasarana pada Direktorat Sarana dan Prasarana
71.	Kepala Seksi Dukungan Perbekalan pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sarana dan Prasarana	Subkoordinator Dukungan Perbekalan pada Direktorat Sarana dan Prasarana
72.	Kepala Seksi Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Rencana dan Pengembangan pada Direktorat Sistem Komunikasi
73.	Kepala Seksi Standardisasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Standardisasi pada Direktorat Sistem Komunikasi
74.	Kepala Seksi Penyiapan Dukungan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Penyiapan Dukungan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi
75.	Kepala Seksi Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya pada	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Sertifikasi Pemancar Sinyal Marabahaya

	Direktorat Sistem Komunikasi		pada Direktorat Sistem Komunikasi
76.	Kepala Seksi Inventarisasi Peralatan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Inventarisasi Peralatan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi
77.	Kepala Seksi Pemeliharaan Peralatan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Sistem Komunikasi	Subkoordinator Pemeliharaan Peralatan Komunikasi pada Direktorat Sistem Komunikasi

B. Singkatan dan Akronim Unit Kerja

No.	NOMENKLATUR UNIT KERJA	SINGKATAN
1	BIRO PERENCANAAN	BIRO REN
2	BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN	BIRO KUMPEG
3	BIRO UMUM	BIRO UMUM
4	PUSAT DATA DAN INFORMASI	PUSDATIN
5	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT
6	DIREKTORAT OPERASI	DIT OPS
7	DIREKTORAT KESIAPSIAGAAN	DIT SIAGA
8	DIREKTORAT BINA TENAGA	DIT BIN-GA
9	DIREKTORAT BINA POTENSI	DIT BIN-POT
10	DIREKTORAT SARANA DAN PRASARANA	DIT SARPRAS
11	DIREKTORAT SISTEM KOMUNIKASI	DIT SISKOM



SEKRETARIS UTAMA,

DIANTA BANGUN

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)